

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adjie, Habib, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Dimiyati dan Mudjiono. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Hajati Sri et al., *Hukum Waris Adat, Islam, dan Burgelijk Wetboek*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2022.
- Manan, Abdul dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Djaja S, , *Hukum Waris Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan perdata Barat (Burgerlijk Wetbook)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Sudjito. *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Sjarif, S. A, Elmiyah, N. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Menu Pewarisan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Wahyono Padmo. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. Jurnal

Adli, A, “Penyelesaian sengketa waris adat bagi masyarakat beragama islam berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Volume 9 Nomor 1 (Februari 2020): <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06>

Atikah, N., “Kedudukan surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan indonesia”, *Notary Law Journal*, Volume 1, Nomor 3 (Juli-September 2022): <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>.

F Andraini, “Perbedaan Golongan Penduduk dalam Proses Pendaftaran Hak atas Tanah Karena Pewarisan”, *Notarius*, Volume 1, Nomor 1 (Maret 2012): <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1129>

Hadi, Syofyan dan Tomy Michael, “Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 5 Nomor 2 (2017): P-ISSN: 2548-1762, E-ISSN: 2548-1754

Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum”, *Juridica*, Volume 2, Nomor 1 (November 2020): ISSN: 2721-2653

Paramyta & Alfarisi, “Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam”, *Lex Lectio*, Volume 2, Nomor 1 (2023): <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.27>.

Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No 1 (2023): ISSN: 2746-5055.

Riza, Dola, “ Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (2018): P-ISSN: 2528-7273.

Situmorang, C. I. and Triadi, I., “Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas.”, *Journal Customary Law*, Volume 1, Nomor 2 (Maret 2024): <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>.

Sugitha, K. and Dahana, C. “Urgensi pengaturan pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia”. *Acta Comitas*, Volume 6 Nomor 03 (2021): 523.
<https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p5>

Syofyan Hadi dan Tomy Michael, “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration”, *Jurnal Cita Hukum* 5, Volume 5, No. 2. (Agustus 2017):
<https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.

Yulandari, M., Yamin, M., Zaidar, Z., & Harianto, D. “problematika lahirnya sertifikat hak atas tanah yang berasal dari tanah warisan yang belum dibagi”, *LJoALR*, Volume 2 Nomor 12 (Desember 2023):
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.258>.

C. Tesis

Citra L, Yulina, “Tinjauan Hukum Pluralisme Kewenangan Pembuatan Dan Bentuk Surat tanda bukti sebagai ahli waris Berdasarkan Perbedaan Antara Warga Negara Indonesia Penduduk Asli Dan Warga Negara Indonesia Keturunan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Agung S, Krisna, “Implementasi Pembuatan Surat tanda bukti sebagai ahli waris Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten Kulon Progo”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Menteri Agraria dan Menteri Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 227 K/TUN/2018 perihal Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 188/B/2017/PT.TUN.SBY

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2378 K/Pdt/2016 perihal Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 521/PDT/2015/PT.BDG